

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG
PENDAYAGUNAAN INFAK UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR
DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT
(Studi Pada Yayasan Daarut Tauhid Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

**ANISSA AGNA
(1621030558)**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG
PENDAYAGUNAAN INFAK UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR
DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT**

(Yayasan Pada DT Peduli Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

ANISSA AGNA

NPM:1621030558

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Pemanfaatan dana zakat terus mengalami perkembangan, tidak hanya diperuntukkan bagi delapan golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi banyak dipertanyakan kebolehan oleh masyarakat. Karena masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi. MUI sebagai lembaga independen yang dapat mengeluarkan fatwa berusaha memberikan hukum yang pasti terkait pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih. Dengan alasan ini maka disusunlah karya ilmiah yang membahas tentang fatwa MUI terkait pendayagunaan zakat infak bagi pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan zakat infak pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat pada DT Peduli. 2) Apa faktor pendukung, penghambat dalam menerapkan Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan ZISWAF pada Yayasan DT Peduli. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi di DT Peduli. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode observasi, wawancara, penelaahan dokumen. Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yang dilakukan terhadap di lakukan DT Peduli untuk pembangunan sarana air dan sanitasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara editing, coding, Reconstructing dan Systematizing. Sehingga data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode data deskriptif kualitatif. Dari penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembangunan sarana air dan sanitasi dengan menggunakan sistem dana infak terikat dan mengaitkan masyarakat secara langsung untuk program sanitasi tersebut. dari sisi pendayagunaan, upaya dilaksanakan dengan cara melakukan sumber dana, pengalokasian, pensosialisasian dan pendataan serta optimisasi fasilitator atau pemberian fasilitas sebagaimana pula yang di lakukan oleh Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan zakat infak hal tersebut juga dilakukan oleh DT Peduli Lampung.

Kata kunci : *Implementasi dan Pendayagunaan*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN INFRAK UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT (Studi Pada Yayasan Daarut Tauhid Bandar Lampung)

Nama : ANISSA AGNA

NPM : 1621030558

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag
NIP. 197111061998032005**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN INFRAK UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT (Studi Pada Yayasan Daarut Tauhid Bandar Lampung). Disusun oleh Anissa Agna NPM. 1621030558. Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Desember 2020

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I.

Penguji Utama : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP.196210221993031002**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anissa Agna
NPM : 1621030558
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Bagi Masyarakat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 23 November 2020



Penulis

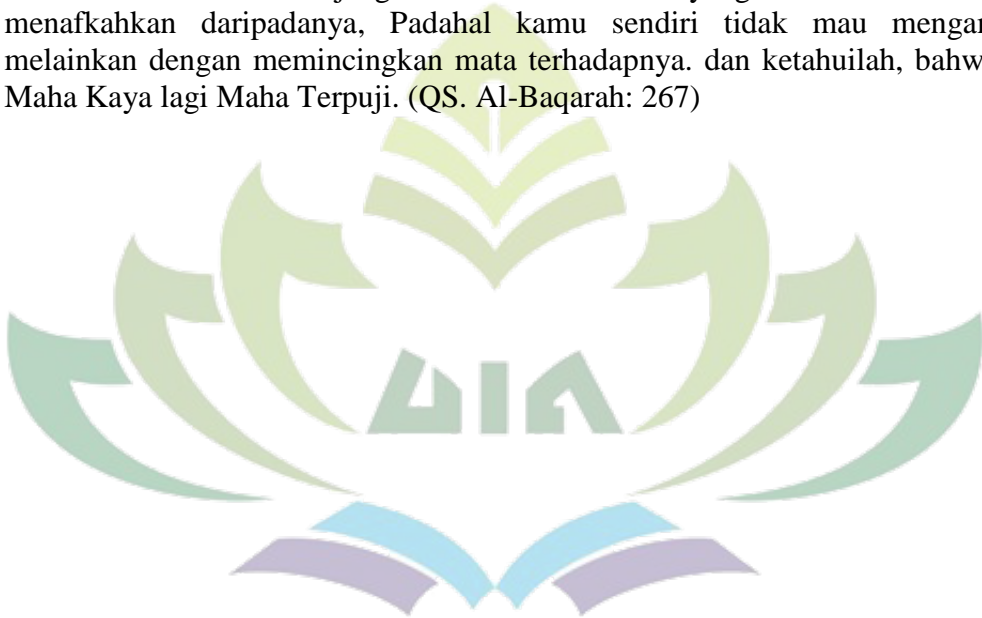
Anissa Agna

NPM:1621030558

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)



PERSEMBAHAN

Skripsi dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Naidi dan Ibuku Johro, yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan rasa dan juga jerih payah atas segalanya, yang selalu memberikan semangat tiad henti dan dengan sabar menantikan keberhasilanku. Semoga semuanya bernilai Ibadah dimata Allah SWT.
2. Kepada adikku serta saudara sepupuku, terimakasih banyak atas do'a, motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studiku, semoga kita selalu mendapatkan Rahmat Allah SWT.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Anjella, Rohma, Tanti, Devie, Anisa.dan disertai team Kencleng Terimakasih selalu memberiku semangat dan selalu dalam suka dukaku.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. terimakasih atas bantuan tenaga fikiran dan bimbingannya dari awal penyusunan sampai selesai.
5. Teman-teman angkatan 2016 terkhusus kelas K.
6. Teruntuk kamu Inggar Pryadana terimakasih sudah menemani suka duka dalam mengerjakan skripsi ini, yang sudah mau di repotkan
7. Hasil penelitian juga aku persembahkan untuk Inggar Pryadana, terimakasih sudah banyak membantu dari awal mengerjakan skripsi ini hingga selesai sampai tahap akhir.

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Anissa Agna, dilahirkan desa Sinar Banten, kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 09 November 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Bapak Agus Naidi dan Ibunda Ibu Johro. Pendidikan penulis ini dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Banding Agung pada tahun 2003-2010. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Talang Padang pada tahun 2010 lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) Talang Padang pada 2013 hingga tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan tingkat pendidikan perguruan tinggi negeri pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung pada semester 1 tahun Akademik 2016/2017.

KATA PENGATAR

Segala puji hanya kepada Allah SWT Robb semesta alam yang telah menciptakan manusia agar beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, skripsi yang berjudul: **“Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-Ix/Mui/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Bagi Masyarakat”**, dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Kebersihan ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa bimbingan, dukungan, do'a dan bantuan berbagai pihak, oelh karenanya dengan seluruh kerendaraan hait dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

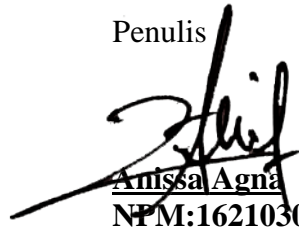
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretasis Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. yang telah memberikan saran, masukan dan perhatian selama ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya.
5. Bapak dan ibu Dosen seluruh Civitas Akademika Fakultas Syaria'h UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu, adik serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
8. Kepala cabang Mislam Hakim dan Kasubag Retail Bapak Suprpto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kerja sama hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*. Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karenanya kepada para pembacanya kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 03 Desember 2020

Penulis


Anissa Agna
NPM:1621030558

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Infak	17
1. Pengertian Infak	17
2. Dasar Hukum Infak	18
3. Macam-macam Infak	20
4. Rukun dan Syarat Infak.....	21
5. Tujuan Infak	24
B. Lembaga Amil Zakat.....	25
1. Pengertian Lembaga Zakat.....	25
2. Dasar Hukum Lembaga Zakat	28
3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat.....	30
4. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat.....	31

C. Kajian Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Infak Bagi Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat.....	32
1. Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015.....	32
2. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Sarana Air Dan Sanitasi	37
3. Ketentuan Terkait Pembangunan Dan Pendayagunaan Sarana Air Dan Sanitasi	38
D. Kajian Pustaka.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat DT Peduli	53
1. Visi Dan Misi	57
2. Struktur Organisasi DT Peduli	57
B. Pengelolaan dan Program Implementasi Pada DT Peduli	64
C. Upaya Daarut Tauhid Dalam Melaksanakan Pembangunan Sarana Air.....	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Terhadap Pendayagunaan Zakat Infaq DT Peduli.	72
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Pada DT Peduli	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1: Surat Rekomendasi Penelitian**
- 2. Lampiran 2: Berita Acara Seminar Proposal**
- 3. Lampiran 3: Blangko Pertanyaan**
- 4. Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian**
- 5. Lampiran 5: Panduan Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan, diperlukan penjelasan atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini, yang memiliki beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Implementasi

Berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Implementation*" menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan zakat bagi Fatwa MUI untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat.

2. Fatwa MUI

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf* dari kata *al-fataa* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafosa) atau (isti'arah).

Sedangkan Fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persolan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹

¹ Qardhawi Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil manfaat; pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

4. Sanitasi

Yang dimaksud sanitasi adalah sarana dan/atau prasarna yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

5. Daarut Tauhid

Dompot peduli umat adalah sebuah lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan penggalangan dana (FUNDRAISING) dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA).²

6. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah pokok di atas, penulis tegaskan kembali bahwa judul atau tema yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Pembangunan Sarana Air

²Lembaga DPU Daarut Tauhid

³ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h.7.

dan Sanitasi Bagi Masyarakat (Studi Pada DT Peduli Bandar Lampung)” yang ruang lingkup bahasannya mencakup bagaimana pelaksanaan Infak untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat dan Implementasi terhadap Lembaga peduli Daarut Tauhid yang tidak semua dari lembaga tersebut menerapkan pelaksanaan pendayagunaan pembangunan sarana air dan sanitasi Masyarakat, tetapi hanya satu lembaga yang memiliki penerapan pembangunan sarana air yaitu dari dana Infak.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
 - a. Karena tempat penelitiannya mudah di jangkau
 - b. Referensinya mudah di dapat
 - c. Belum ada yang membahas dan meneliti pada objek penelitian skripsi
 - d. peneliti tertarik untuk memilih dan membahas judul ini
2. Alasan Subyektif
 - a. Pokok bahan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah.
 - b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini tersedia di perpustakaan dan Buku Juklak.

- c. Peneliti tertarik dengan regulasi zakat yang memberikan banyak pembaharuan pada sistem pengelolaan zakat dengan salah satu pembaharuan yang dicanangkan adalah bahasan skripsi penulis.
- d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sarana air, air merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian. Dalam kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Sedangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Keperluan manusia akan air bervariasi sesuai dengan tempat orang tersebut tinggal. World Health Organization (WHO) memperhitungkan bahwa kebutuhan air masyarakat di Negara berkembang (pedesaan)

termasuk Indonesia antara 30-60 liter/orang/hari, sedangkan di Negara-negara maju atau di perkotaan memerlukan 60-120 liter/orang/hari.⁴

Pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat untuk lembaga pengelolaan Zakat resmi termasuk kedalam salah satu pembaharuan yang dicanangkan dalam sistem pengelolaan zakat dengan Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid sebagai pengumpul zakat nasional untuk semakin ditingkatkan, yang tujuannya ialah sebagai bukti keseriusan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan jumlah pengumpulan zakat sehingga terpenuhi target sesuai dengan potensi yang ada, karena disetiap tingkatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki target yang berbeda-beda.

Implementasi Fatwa MUI No.001/Munas-IX/MUI/2015 mengenai pendayagunaan Infak untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat. Pendayagunaan ZISWAF ini, diharapkan dapat menambah efek berlipat (*multiplier effect*) terhadap upaya upaya pemerintah tersebut. Fatwa tersebut telah di sosialisasikan untuk seluruh provinsi yang melibatkan pihak kemenkes, bappenas, bappeda, dinas kesehatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan MUI pusat dan provinsi. Sebagai realisasinya, pembangunan sarana air dan sanitasi di Lembaga Daarut Tauhid dengan menggunakan dana Infaq telah dilakukan (di Desa Tegi Neneng, Sido Basuki (Pesawaran), Dusun Pejambon Kec. Negeri Keraton Pesawaran, Way Muli Kec. Raja Basa Kalianda.)

⁴Program Nasional Penyedia Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lembaga *Amil Zakat* yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Lembaga Amil Zakat (LAZ) membantu Badan *Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) untuk melakukan pengelolaan zakat baik di Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota dengan melaporkan data pengelolaanzakat baik pengumpulan maupun data pendistribusiannya secara rutin 6 bulan sekali.

Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid berusaha untuk mengatasi hal-hal untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap Zakat, Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid juga berusaha menyalurkan dana yang sudah di terima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menrima zakat menjadi pemberi zakat dan juga termasuk membangun sarana air di dalamnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air. Pembangunan sarana air yang di bangun seperti Water ware MCK dan sumur bor.⁶

Kiprah DT peduli⁷ ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian di tetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004.

2020 ⁶Wawancara Dengan Mbak Marni Staf *Lembaga DPU Daarut Tauhid*. Tanggal 6 Januari

⁷www.dtpeduli.org/zakat

Sehubungan dengan keterkaitan beberapa lembaga dalam penerapan fatwa perlu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari para pihak yang terkait sehingga mempermudah dan mempercepat penerapan Fatwa MUI guna mencapai kemaslahatan umat. Hal ini mengingat karena semua pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu memecahkan permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan. Pembahasan dilakukan baik dari pandangan syariat Islam maupun dari ketetapan hukum negara yang berlaku, khususnya dalam memenuhi pandangan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin.

Dalam penerapan Fatwa ini, MUI memandang perlunya melibatkan koperasi Syariah (Kopsyah). Kopsyah tidak hanya mengumpulkan, menyediakan pendanaan, namun juga sekaligus melakukan pembinaan anggotanya dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip Syariah. Sedangkan pendanaan dalam lembaga DPU Daarut Tauhid menggunakan pendanaan kerja sama dengan perusahaan.

Jadi yang dimaksud judul implementasi Fatwa MUI no. 001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan infak untuk pembangunan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat (Pada Daarut Tauhid Bandar Lampung) yaitu pembangunan sarana air dan sanitasi dalam proses melaksanakan program yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan program-program yang ada di lembaga Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid cabang Lampung.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka fokus Penelitian adalah implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan ZISWAF untuk sarana air dan sanitasi masyarakat. Khususnya pembangunan sarana air dan sanitasi dilakukan dengan menggunakan dana Infak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan infak pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat pada Yayasan DT Peduli?
2. Apa faktor pendukung, penghambat dalam menerapkan Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan ZISWAF pada Yayasan DT Peduli?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendayagunaan Infak untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi di DT Peduli.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta meningkatkan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di UIN Raden Intan Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan sistem pengelolaan zakat kedepannya, memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya terutama dalam ruang lingkup praktik zakat pada e-commerce.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil Studi Kasus ini dapat memberikan pemahaman tentang pendayagunaan Zakat Infak Shodqoh Wakaf itu seperti apa, bagaimana Implementasi pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi pembangunan sarana air dan

sanitasi masyarakat dan semoga pemerintah bisa ikut memantau aktifitas lembaga agar lebih memberikan manfaat positif dalam pembangunan sarana air.

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah dan sampai pada tujuan yang diinginkan, penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena menggunakan metode alamiah, melakukan analisis,⁸ teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini membutuhkan data dari lapangan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IXI/2015 tentang pendayagunaan infak untuk sarana air dan sanitasi Masyarakat dan apakah pengelolaan di Daarut Tauhid semuanya sama seperti pada Fatwa MUI.

⁸ Sugiyono, *Model Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa bukti program implementasi dari fatwa MUI dalam pendayagunaan zakat untuk pemberian sarana air bersih dan sanitasi masyarakat sebagai pengelola zakat yang terdapat pada Daarut Tauhid (DT Peduli) Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan dengan melalui riset pustaka (*library research*). Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan primer, yaitu berupa Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa.
2. Bahan sekunder, yaitu berupa reformasi dan kitab-kitab.
3. Bahan tersier, yaitu berupa kamus ensiklopedia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.⁹ Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 orang yaitu dari

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 173.

pihak Daarut Tauhid dan masyarakat yang sebagai penerima bantuan pembangunan sarana air.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.

Dalam penelitian sampel yang digunakan teknik sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik teknik sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel adalah bertujuan karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan¹⁰. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan lembaga Kepala Cabang DT, 5 orang sebagai pengurus DPU Bandar Lampung dan 1 wilayah yang berjumlah 50 rumah, yang masing-masing dalam setiap rumah terdiri dari 4-6 orang yang jumlah keseluruhannya ada ± 200 orang yang menggunakan air dari bantuan program pembangunan sarana air dan sanitasi.

Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan yang memimpin suatu lembaga cabang DPU Daarut Tauhid Bandar Lampung.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.85.

- b. Staff pengurus yang memberi layanan serta melaksanakan kegiatan di lembaga DPU Daarut Tauhid.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan terhadap penerapan Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Bagi Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat di DT Peduli Bandar Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, dalam hal ini yang menjadi responden ialah pimpinan dari Daarut Tauhid Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹¹ Data-data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah daftar LAZ yang telah terdaftar secara resmi untuk melakukan pengelolaan zakat.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; Bima Akasara, 1981), h.202

5. Metode Pengelolaan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, adapun pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah. Penulis mengumpulkan bukti-bukti mengenai daftar LAZ yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pengelola zakat resmi.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen). Penulis memilah kembali data yang telah diperoleh dari responden untuk diteliti lebih lanjut.
- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹²

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.¹³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dekriptif kualitatif disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan zakat infak bagi pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.

Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁴

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), h. 244

¹⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan Bahasa LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi atau sifat umum.¹⁵



¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM, 1983), h.80

BAB II

LANDASAN TEORI

A. INFAK

1. Pengertian Infak

Infak adalah macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infak berasal dari kata *anfaqa* atau to spend: mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang)/ dalam kitab *At Ta'rifat Syaikh Al Jurjani*, mendefenisikan Infak yaitu penggunaan harta untuk sesuatu hajat (kebutuhan)

Jadi menurut definisi infak itu berkaitan dengan amal materi (harta/mal). Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QA. Al-Baqarah [2]: 262)

Dalam ayat tersebut. kata *Infak* di iringi dengan kata *amwal* (harta).

Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah member kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah unfak

yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infak tersebut.

2. Dasar Hukum Infak

Penegrluaran infak merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengerluarkan infak memiliki tanda-tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang taqwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan mengeluarkan harta, salah satunya melalui infak.

Syariat telah memberikan panduan kepada kita berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar kita menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk diri sendiri (QS. At-Taghabun:16)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghabun:16)

Serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS. Ath-Thalaq:7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak (QS. Al-Baqarah [2]: 267).¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau Hadits yang artinya, “katakanlah:”kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhankan, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan adalah manusia itu sangat kikir”.

¹⁶ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 51.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Dzariyat 51:19 disebutkan yang berbunyi

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S Adz-Dzariyyat [51]: 19)

3. Macam-macam Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1. Infak mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2. Infak wajib

Aplikasi dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti

- a) Membayar mahar (mas kawin)
- b) Menafkahi istri
- c) Menafkahi isri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah

3. Infak haram

Mengerluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a) Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam

“sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan di kalahkan. Dan kedalam jahanam lah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.

- b) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

4. Infak sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shodaqoh. Infak tipe ini yaitu ada dua macam sebagai berikut:

- a) Infak untuk jihad
- b) Infak kepada yang membutuhkan

4. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun

tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki empat rukun:¹⁷

1. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Orang yang diberi infaq

Maksudnya oarang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya,

¹⁷ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fatih 'Ala Al-Madzhab Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

4. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari

mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.¹⁸

5. Tujuan Infak

Adapun tujuan infak sebagai berikut:¹⁹

- a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
- b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan kederajat mencukupi
- c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan di jalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat di akhirat
- d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 178

¹⁹ Fatullah, 2015, h. 47

B. LEMBAGA AMIL ZAKAT

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosila dan kemaslahatan umat Islam.²⁰ Adapaun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsure masyarakat dab pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengantugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan asas-asas Lembaga Pengelola Zakat.²¹

Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *'amalin 'alaiha* (orang-orang yang bertugas mengurus zakat). Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang

²⁰ Susiadi AS, “*Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum*” Asas: Jurnal Vol 12, No. 01, 2020.

²¹ Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta.²²

UU No. 38/1999 menjadi *milestone* sejarah zakat Indonesia moderen, berbasis desentralisasi dan kementerian antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU No. 23 /2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelola zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).²³

Amil di ambil dari kata amal yang biasanya di terjemahkan dengan "yang mengerjakan/ pelaksanan". Imam Al-Qurtubhi dalam kitabnya "*AlJami li Ahkam Al-Quran*" sebagaimana yang telah di kutip oleh Dindin Hafifudin menasirkan ayat tersebut (QS. At-Taubah : 60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf

²² Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premadamedia Grup, Jakarta, hlm 144

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(At-Taubah Ayat 60).

Menyatakan bahwa "amil adalah orang-orang yang di tuaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menguruskan, menghitung dan mencatat zakat yang di ambil dari muzakki untuk kemudian di berikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴

Amil zakat menurut Sayyid Sabiq adalah " orang-orang atau lembaga yang di tugaskan oleh iamam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, mengatur administrasinya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan definisi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa amil zakat yang diangkat oleh pemeritah untuk melaksanakan perintah yaitu untuk mengurus zakat dan memberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam keputusan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang pengelolaan zakat yakni pasal ayat (1) disebutkan bahwa yang disebut badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di tujuk pemerintah dan ada juga menjadi (LAZ) lembaga amil zakat yang di tunjuk oleh masyarakat Unit kumpulan zakat (UPS).

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Almanar, Mesir, 2010, hlm 513*

2. Dasar Hukum Lembaga Zakat

Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat di bawah UU No. 23 Tahun 2011, setelah RUU amandemen UU No. 38 Tahun 2014 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011.²⁵ UU No. 38/1999 menjadi *milestone* sejarah zakat Indonesia moderen, berbasis desantralisasi dan kementerian antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU No.23 /2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelola zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).

Dalam rangka institusional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (Pasal 15) di mana BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan (Pasal 16). Maka peran masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).

Dengan menjalankan fungsi legulator (menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan

²⁵ *Ibid*, hlm. 113

zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (penyelenggaraan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelolaan zakat nasional), pada saat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁶

UU No. 23/2011 memberikan pertanggung jawaban kepada BAZNAS yaitu ditetapkan suatunya lembaga yang berhak mengelola atau berwenang dalam mengelola zakat nasional (Pasal 6), kegiatan merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapatkan pembiayaan dari APBN dan tambahan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk Organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten kota hingga kelurahan (pasal 30).²⁷

²⁶ Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷ *Ibid*, hlm.114

3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat AtTaubat ayat 60, ayat ini menjelaskan zakat itu diambil dijemput dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada orang yang menerimanya (mustahiq).²⁸ Pengelolaan zakat ditangani oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi mempunyai kekuatan hukum normatif dan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
- b. Untuk merasa menjaga perasaan rendah hati para mustahiq apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁹

²⁸ Diqin Afifudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan memberdayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Gema Insani, Jakarta, 2007, hlm 168.

²⁹ Muhamad Ibid, hlm 3-4

4. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan:³⁰

- a. Syariat Islam
- b. Amanah. Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat yang harus dipercaya.
- c. Kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- f. Terintegrasi. Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

C. Kajian Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Infak Bagi Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat

1. Latar Belakang Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015

Setiap peraturan pastilah memiliki latar belakang atau landasan yang digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan tersebut agar dapat diterapkan dikalangan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum. Termasuk juga fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak luput dari latar belakang terbitnya fatwa tersebut.

Masalah air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti dilaporkan oleh lembaga *World Health Organization (WHO)* bahwakematian secara global yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan melalui air (*water borne disease*) telah mencapai 3,4 juta jiwa/tahun. Di antara penyakit yang menular dikarenakan (*water borne disease*) yaitu pneumonia, diare dan komplikasi neonatal, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak bahkan pembunuh utama bagi anak-anak. Secara global telah dilaporkan bahwa diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 2,2 juta jiwa/tahun. Kualitas air minum yang tidak sesuai dengan standart kesehatan dan kurang memadainya sistem pembuangan air limbah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan serta dapat menimbulkan berbagai penyakit disekitar pemukiman warga.

Dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin mendesak sedangkan pemerintah belum menggarakan air untuk keperluan tersebut, maka harus ada penanganan yang sigap sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit pada masyarakat. Hal ini menjadikan komisi fatwa MUI segera merumuskan fatwa yang berkaitan kebolehan pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Amanat UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat harus didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, pendistribusiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahannya.³¹

Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokok dari *mustahiq* tersebut. pada intinya zakat merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, dengan pendistribusian zakat diharapkan bisa merubah kehidupan masyarakat dari semula sebagai *mustahiq* agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga kedepannya mereka bisa menjadi *muzakki*.

Dalam penyaluran dana zakat terdapat pertanyaan terkait kebolehan perluasan manfaat dana zakat agar lebih dirasakan

³¹ <https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/>

pemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam waktu yang lama, dengan salah satunya untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang benar-benar membutuhkan.³² Dengan adanya pertanyaan dan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terkait sarana air bersih dan sanitasi pemerintah belum menganggarkan secara maksimal untuk kepentingan itu maka harus segera ditangani agar tidka terjadi penyebaran penyakit dikarenakan air kotor.

MUI dalam menetapkan hukum pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi mengamalkan beberapa dalil yang dijadikan beberapa dasar hukum. Di antara dalil-dallil yang digunakan MUI yaitu:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

“...dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup...”³³

Ayat di atas menerangkan posisi penting air bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia merupakan salah satu ,makhluk hidup yang terus bergantung dengan adanya ketersediaan air, khususnya air bersih. Dalam kehidupannya air bersih sangat dibutuhkan guna mensucikan diri seperti mandi wudhu dan *istinja'* yang menggunakan air bersih agar

³² Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015

³³ QS. Al-Anbiya (21): 30.

terpelihara kesehatan yang diturunkan oleh Allah swt dari langit untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi.³⁴

Terhadap masalah penggunaan air, terdapat anggapan air merupakan suatu barang bebas yang disebabkan oleh alam, atau sebagai sumber daya alam yang diperbarui setiap orang bebas menggunakan tanpa harus membayar dengan harga tertentu. Namun orang bebas menggunakan tanpa harus membayar dengan harga tertentu. Namun anggapan ini mungkin terasa benar ketika dimasa lampau yang notabene ketersediaan air melimpah ruah dan jumlah penduduknya masih sangat sedikit. Maka MUI dalam rekomendasinya menyatakan bahwa masyarakat perlu bahu-membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran air.

Pada dictum MUI tentang pendistribusian dana zakat juga di sebutkan bahwa penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai implementasi *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yaitu boleh dengan ketentuan.

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung.

³⁴ Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015

2. Adapun manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut di peruntukan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah annah) dan dengan dasar kebajikan

Dari beberapa paparan di atas, dapat di simpulkan bahwa MUI mengambil dalil dalil bersifat kontemporer dan beberapa kaidah ushuliyah dengan dasar bahwa pendayagunaan zakat pada umumnya adalah hanya untuk orang-orang yang di sebutkan Allah dalam al Qur'an. Kebutuhan mustahiq kian waktu berbeda-beda, jika dahulu hanya dengan diberikan bahan pokok sudah mewakili dari makna pendistribusian zakat, namun kini bukan lagi masalah kebutuhan pokok melainkan kebutuhan dalam menjaga kebersihan dan kelayakan dalam kesehatan. Maka MUI memutuskan kebolehan dana zakat untuk pembangunan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat.

Adapun yang latar belakang terbitnya fatwa tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah:

- a. Banyak daerah yang belum bisa membangun sarana air bersih dan sanitasi.
- b. Banyak daerah yang kekeringan.
- c. Sulit dalam mendapatkan akses air bersih.
- d. Apabila tidak dibangun sanitasi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

- e. Memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

2. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi

Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat Penetapan fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan tapi juga membuka peluang dalam penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari kaum muslimin secara spesifik yang peruntukannya lebih khusus, yakni masyarakat muslim dhuafa, pesantren, dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagai basis pendidikan para calon ulama umat yang merupakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga tumbuh pemberdayaan masyarakat guna mencapai komunitas masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.³⁵

³⁵ S. Prabowo H. Hayu, et al. *Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: 2016) h. 6-7

3. Ketentuan terkait pembangunan dan pendayagunaan sarana air dan sanitasi

Program STBM dimulai dengan sosialisasi dan pemicuan kepada Jamaah dan masyarakat umum oleh para dai sebagai agen perubahan. Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi local bersama untuk penyediaan air bersih serta stop buang air besar sembarangan (stop BABS) atau perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) atau pengelolaan dan survey dengan sasaran seluruh komponen masyarakat. Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah jangkauan dakwah, baik pada jamaah masjid, majelis taklim ataupun pengajian rutin lainnya. Untuk menjamin efektifitas proses pemicuan, sebaiknya pengurus Masjid/ Ketua Ponpes/ Kepala Desa/ Lurah/ Perangkat Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat sarana air dan sanitasi, yaitu:³⁶

- a. Totalitas, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan perilaku secara kolektif.
- b. Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi masyarakat menentukan sendiri sarana air dan sanitasi yang akan dibangun.

³⁶<http://nawasis.org/portal/panduan/Buku%20Juklak%20ZISWAF%20untuk%20Air%20&%20Sanitasi.pdf>

Sedangkan prinsip yang harus diperhatikan dalam memicu perubahan perilaku STBM memenuhi kriteria keputusan alur penularan penyakit seperti diare, demam berdarah, alergi gatal-gatal.

Setelah dilakukan pemecutan melalui pendekatan kesehatan dan kegamaan kepada masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih dan sanitasi maka tahap selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri memenuhi pembangunannya. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangan yaitu:

1. Cakupan fasilitas, apakah untuk fasilitas komunal ataupun rumah tangga.
2. Aspek financial. Apakah pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat?

Bagaimana kesiapan koperari setempat mendukung program ini? Apakah bisa digunakan pembiayaan komersial atau apakah harus menghimpun dana melalui program urun dana dengan dana ZISWAF?

Penerapan pemberdayaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat perlu koordinasi yang erat antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jejaring yang telah dibangun bersama oleh MUI pusat. Bappenas dan Kemenkes. Koordinasi ini meliputi pemilihan lokasi, edukasi, sosialisai, pendanaan, palaksanaan pembangunan, pengawasan serta operasi dan perawatan pasca pembangunan. Secara umum penerapan pembangunan air bersih dan

sanitasi, dimulai dari tahap persiapan, tahap seleksi, tahap pembangunan, hingga tahap pasca pembangunan.

3. Aspek legal. Untuk fasilitas komunal, maka perlu ada kejelasan mengenai status kepemilikan tanah yang akan digunakan. Apalagi bila pembangunan menggunakan dana wakaf, maka tanah yang digunakan haruslah tanah wakaf ataupun tanah pemerintah yang digunakan untuk fasilitas public.
4. Aspek teknis. Fasilitas public ataupun rumah tangga harus melihat aspek teknis sehingga dapat digunakan teknologi tepat guna, misal: penyediaan air tidak hanya member sumur air, tapi dilakukan dengan teknik-teknik simpan, hemat dan jaga air.
5. Aspek kelembagaan. Perlu ditentukan siapa yang akan melakukan pengelolaan mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta mengambil keputusan atas kebutuhan masyarakat tersebut sehingga bisa bersinergi dengan program pemerintah.

Masjids dan pondok pesanteren dianggap institusi yang paling siap ditinjau dair misi dakwahnya, organisasinya serta pengaruhnya di masyarakat yang mayoritas Islam.³⁷

³⁷ S. Prabowo H. Hayu, et al. *Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: 2016)

1. Tahapan Persiapan

a. Pembentukan Tim Pelaksanaan (Timlak)

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi baik untuk fasilitas komunal maupun individual harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Tugas-tugas diemban oleh Timlak yang terdiri dari Masjid/Pesantren, Dai Sanitasi dan Koperasi Syariah. Masing-masing unsur memiliki tugas dan fungsi, dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan akses air bersih dan sanitasi dengan urun dana secara gotong royong ataupun penggalangan ZISWAF.

Kelembagaan ini dibentuk dan terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan samapi pengoprasian dan pemeliharaan, sehingga Timlak dapat memahami program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terdapat desain program dengan mempertimbangkan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap pasca program.³⁸

Tugas pokok dan fungsi Timlak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
 - a. Sebagai coordinator Dai Sanitasi dalam wilayah Kecamatan.
 - b. Melakukan pemeliharaan, pelatihan dan pejabat terkait untuk pelaksanaa program penyediaan akses air bersih dan sanitasi masyarakat.

³⁸ S. Prabowo H. Hayu, et al. *Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: 2016)

- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pembangunan air dan sanitasi dengan mempertimbangkan kelima aspek tersebut diatas.
- d. Melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat untuk bersama-sama merumuskan rencana strategis dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penyediaan layanan air minum dan sanitasi dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
- f. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
- g. Membangun transparansi dan akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban.
- h. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan dengan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun pembangunan desa/kelurahan pada umumnya.
- i. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi

- a. Penggerak Dai Sanitasi untuk advokasi dalam mengintegrasikan kebutuhan program di masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.

- b. Penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai-nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
 - c. Mitra kerja pemerintah desa/kelurahan setempat dalam upaya penyediaan layanan air bersih, sanitasi, kesehatan, kesehatan lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - d. Pembangkit dalam memediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
 - e. Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa/kelurahan setempat.³⁹
- b. Penetapan/penentuan target

Penetapan target dari pembangunan air bersih dan sanitasi dapat mengacu pada buku strategis sanitasi Kabupaten dapat program percepatan pembangunan sanitasi dan pemukiman yang diterbitkan Bappeda. Informasi dan data-data tersebut dilakukan pembahasan untuk:

1. Menetapkan target daerah dan rencana kerja melalui langkah sinergi dengan program pemerintah daerah.
2. Membuat rencana kerja dengan mempertimbangkan cakupan dan kelima terkait.

Penetapan target dengan mempertimbangkan cakupan dan kelima aspek terkait.

³⁹ S. Prabowo H. Hayu, et al. *Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: 2016)

Pola hidup sehat dan fasilitas sarana dan prasarana air bersih sanitasi dan sanitasi dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penentuan potensi target adalah:

1. Mendapatkan gambaran kondisi fasilitas air bersih sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan.
2. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam perencanaan pembangunan air bersih dan sanitasi khususnya untuk masyarakat miskin.
3. Memberikan tuntunan keagamaan kepada masyarakat akan pentingnya layanan air bersih dan sanitasi serta membangun spirit saling tolong menolong, khususnya melalui amalan ZISWAF (Zakat Infak Sodakoh Wakaf).

2. Tahapan Seleksi

a. Tahapan Survei

Pertemuan dalam survei dilaksanakan oleh Dai Sanitasi di daerah dakwahnya sebagai berikut:

1. Mencermati sarana air dan sanitasi di Masjid ataupun pondok pesantren yang dikelolanya serta keadaan masyarakat sekitarnya.
2. Mencermati keadaan dan kebutuhan jamaah majelis taklimnya.
3. Survei dari rumah ke rumah melalui pertemuan kegiatan rutin keagamaan.

Pada kegiatan tersebut yang sekurang-kurangnya disampaikan:

1. Penjelasan tujuan survei dengan menjelaskan keterlibatan tokoh Agama dan tokoh masyarakat dalam membantu pemerintah dalam hal edukasi STBM
2. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi (STBM) secara mandiri baik melalui skema pembiayaan komersial dari kopersi syariah ataupun pembiayaan sosial dari dana ZISWAF bagi yang berhak.
3. Dalam hal diperlakukan gotong royong dan penggalangan dana, maka dijelaskan tentang mekanisme penyusunan proposal, promosi untuk pembiayaan melalui dana ZISWAF dan tata cara penyaluran.

Perumusan kesimpulan dan kesepakatan pertemuan survei dan sosialisasi, menyusun daftar masyarakat yang membutuhkan untuk penyusunan dan pengajuan proposal untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, baik yang bersifat komunal maupun individual. Berita acara pertemuan survey didokumentasikan.

b. Penyusunan Proposal

Tujuan proposal diantaranya untuk memperoleh bantuan dan, dukungan, sponsor dan perizinan. Oleh karenanya proposal merupakan perumusan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

a. Pembuatan proposal

Penyusunan proposal dilakukan oleh dai sanitasi dengan tuntutan format proposal pada *lampiran 3* dengan menggunakan data dan informasi dari hasil survei.

b. Pembahasan proposal

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan adalah:

- 1) Dai sanitasi, mempersiapkan berkas proposal berdasarkan survey dan sosialisai yang telah dilakukan.
- 2) Timlak (Tim Pelaksana) memastikan validasi data dan memberikan bantuan asistensi kepada dai sanitasi untuk kelengkapan persyaratan proposal

c. Verifikasi proposal

Verifikasi dilaksanakan oleh timlak yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen proposal dan dokumen pendukung, dengan melihan seluruh aspek kelayakan dari proposal tersebut. tim verifikasi bertanggung jawab dalam memastikan data/informasi dalam proposal adalah benar dan sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan.

- 1) Verifikasi berdasarkan criteria desa / masyarakat sasaran
- 2) Verifikasi kesesuaian data proposal dengan kondisi lapangan

- 3) Verifikasi kesesuaian fiqih serta kelayakan dari segi ekonomi, status pekerjaan masyarakat penerimaan manfaat, kelembagaan dari masjid/ponpes dan kondisi sosial di daerah sekitar.
- 4) Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung.

c. Penghimpunan Dana ZIWAF

1. Melakukan sanitasi sekaligus survey untuk mengumpulkan data dan anggaran proyek baik Komunal atau/dan individual. Kemudian dibuat proposal.
2. Melakukan kampanye bersama di daerah dan Jakarta untuk penggalangan dana ZISWAF.
3. Setelah dana terkumpul, maka akan disalurkan melalui koperasi syariah yang akan ditentukan bersama untuk kemudian didampingi untuk disalurkan ke penerima manfaat.

d. Tahapan Pembangunan

1. Penyaluran ziswaf melalui koperasi syariah

Saluran dengan prinsip STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah, maka penyaluran pembiayaan melalui koperasi syariah sejalan dengan program ini dan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- a) Koperasi syariah memiliki dua macam pembiayaan baik komersil dan sosial.

- b) Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro dapat mengelola dana secara tepat, efisien, efektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga penyaluran dana ZISWAF dapat dilakukan sesuai dengan proyek dan criteria yang ditentukan oleh para donator.
- c) Koperasi syariah melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota dan masyarakat sekitar bersinambungan. Penyaluran pembiayaan akan disalurkan melalui wirausahawan air/sanitasi dengan melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan koperasi syariah.
- d) Koperasi syariah wajib menjalin kerjasama dengan Timlak dan Dai sanitasi. dimana Timlak memiliki tugas kelayakan hasil pekerjaan dari wirausahawan air dan sanitasi.

2. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Untuk pembangunan air dan sanitasi individu diserahkan kepada masing-masing individu untuk fasilitas komunas kegiatan pembangunan oleh wirausahawan sanitasi harus diawasi oleh Dai Sanitasi, Timlak dan Koperasi Syariah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi harus sesuai dengan spesifikasi (persyaratan) teknis yang ditentukan agar sarana yang dibangun juga bisa mempunyai kualitas tinggi (aman, kuat, dan tahan lama).

Pembangunan konstruksi air bersih dapat menggunakan sumber mata air dari salah satu sumber berikut: air tanah dalam (sumur bor), mata air, penampung air hujan, sungai dengan system pengelolaan, dan sumber lainnya. Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air baku, perlu upaya

perlindungan daerah tangkapan air untuk member kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelesatarian lingkungan.

3. Serah terima

Pembangunan saran air minum dan sanitasi dapat diserahterimakan apabila:

- a) Serangkaian kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik telah dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang di RK da layak untuk dimanfaatkan serta berfungsi baik dengan dibuktikan uji keberfungsian prasarana yang terbangun 2 minggu setelah dilakukan proses uji fungsi.
- b) Pertanggungjawaban atas pelatihan masyarakat telah dilakukan
- c) Penanggung jawab fasilitas komunal sudah mendapat pelatihan untuk memelihara dan mengoprasikan sarana air bersih dan sanitasi
- d) Serah terima dilakukan oleh Timlak dan koperasi syariah kepada penerima manfaat
- e) Dokumentasi penyerah terimaan fasilitas air bersih dan sanitasi harus tersedia dengan lengkap sebagai bukti akses universal ke lembaga pemuliaan lingkuan hidup dan sumber daya alam, majelis ulama Indonesia

4. Tahapan pasca pembangunan fasilitas komunal

- a. Operasi dan pemeliharaan
- b. Perhitungan iuran

- c. Pembinaan dan pelatihan untuk pembangunan berkelanjutan

D. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian yang diteliti ini bukan hal baru terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul “Implementasi Fatwa Mui No. 001/Munas-Ix/Mui/2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Infak Bagi Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat (studi di lembaga Daarut Tauhid)”. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut:

Syamsud Dhuha, dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi”. skripsi ini membahas analisis Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/Mui/2015 terkait pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih sanitasi bagi masyarakat dengan analisis perspektif mashlahah al-thufi. Dimana peneliti ini fokus pada latar belakang munculnya fatwa ini adalah adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kebolehan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi disebabkan kebutuhan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dalam sehari sehari-sehari untuk menjamin kesehatan mereka. Kedua, apabila di tinjau dari konsep mashlahah Al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dalam fatwa MUI dijelaskan tentang di jelaskan tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip mashlahah Al-Thufi yang mengendepankan mashalahah untuk

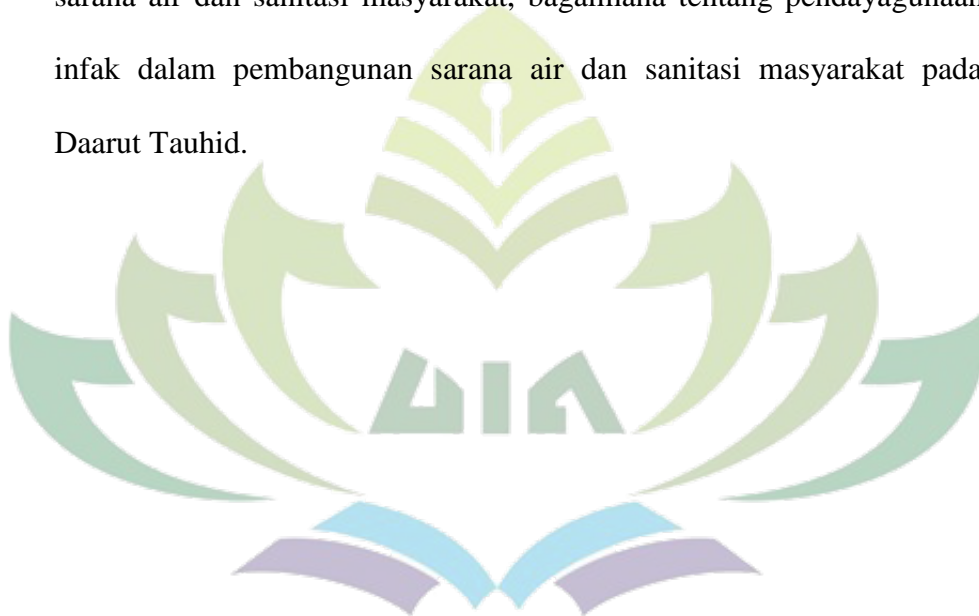
kepentingan umum bagi masyarakat. Fatwa ini juga termasuk dalam bidang mu'amalah karena bersangkutan dengan kemaslahatan umum.

Muhammad Haris dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Padang Mutung Kampar”. Jurnal ini membahas bagaimana implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) pada masyarakat. Pada penelitian ini fokus pada kondisi lingkungan masyarakat yang membutuhkan perbaikan sanitasi yang ditandai dengan macetnya saluran irigasi dan tercemarnya aliran sungai akibat limbah rumah tangga. Sebagaimana kegiatan dalam program PAMSIMAS di Desa Padang Mutung dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

Rika Yulita Amalia, dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Akses Sanitasi Dan Air Bersih”. Jurnal ini membahas bagaimana strategi LAZ Harfa dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Pada penelitian ini fokus pada mengakat salah satu isu yang menjadi tujuan pencapain targetnya yaitu terkait sanitasi dan air bersih. Keberhasilan LAZ Harfa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga bidang lainnya seperti kesehatan lingkungan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat berperan dalam mencapai SDGs (Sustainable Development Goals), dimana akses sanitasi dan air bersih

juga merupakan salah satu tujuan dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh LAZ harfa agar bisa sukses dalam menjalankan programnya.

Setelah melihat dari ketiga karya ilmiah diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah ini berfokus pada implementasi Fatwa MUI tentang pendayagunaan Zakat bagi pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat, bagaimana tentang pendayagunaan zakat infak dalam pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat pada DPU Daarut Tauhid.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afifudin, Diqin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan memberdayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Qadhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, hlm.1-37, dinukil dari Mu'jamal al-Wasith 1-138
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Akasara, 1981.
- Azha, Abi Muhammad, *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hafhiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Huda Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010.
- Munawir, Ahmad Warso, *Al-munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Muhammad al-Khatib, al-aqna (Bairut: Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa'Abdillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fiqr al-Mu'ashir)
- Qordhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun *et al.*, Jakarta: Litera Antar-Nusa Cet. 10, 2007.
- Qasim, M. Rizal, *Pengamalan Fiqh*. Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2009.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Manar, Almanar*. Mesir, 2010.
- S. Prabowo H. Hayu, et al. *Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat* . Jakarta: 2016.
- shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Ensiklopedia Zakat (Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin)*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Bahasa LP2M Raden Intan Lampung, 2015.

W. Al-Alhafidz, Ahsin, M.A, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Inprint Bumi Aksara, 2013) DEPAG RI. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta : IAIN.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premadamedia Grup. Jakarta.

Jurnal:

Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasi Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Wali Pers, 2017, Ed. 1 Cet.2.

Susiadi AS, “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 12, No. 01, 2020.

Zuhraini, Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang”, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12, No. 01, 2020.

Wawancara:

Dokumentasi, *visi Dan Misi Lembaga DT Peduli Cabang Lampung*, 16 September 2020.

Wawancara Bapak Suprpto, *DT Peduli Bandar Lampung*, 21 September 2020.

Wawancara Bapak Mislam Hakim, *DT Peduli Bandar Lampung*, 17 September 2020.

Wawancara Bapak Suprpto, *DT Peduli Bandar Lampung*, 21 September 2020.

Majalah:

Majalah Swadaya Media Komunikasi DT Peduli, Bangun Desa Untuk Indonesia. Januari 2020.

Majalah Swadaya Media Komunikasi DT Peduli. Juli 2019.

Sumber Lain:

www.dtpeduli.org

<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/>

<http://nawasis.org/portal/panduan/Buku%20Juklak%20ZISWAF%20untuk%20Air%20&%20%20Sanitasi.pdf>

Sumber Undang-Undang:

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

